

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana yang dilakukan pada tanggal 30 Mei hingga 2 Juli 2022, maka didapatkan hal sebagai berikut :

1. Mahasiswa lebih memahami pemahaman dan modal sebagai calon apoteker, baik secara peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek. Apoteker harus cermat dan teliti dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, karena seorang Apoteker merupakan orang terakhir sebelum obat dikonsumsi oleh pasien. Apoteker juga memiliki kemampuan *leadership* dan manajemen dalam mengelola sumber daya apotek.
2. Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker dapat menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis demi melakukan sebuah pekerjaan kefarmasian di apotek yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pencatatan, pelaporan, dan pemusnahan obat, serta pelayanan kefarmasian.
3. Mahasiswa calon apoteker dapat memperoleh kesempatan secara langsung untuk merasakan, melihat, dan mempelajari strategi dunia kerja, serta memperoleh pengalaman langsung dalam hal pelayanan kefarmasian baik dalam pelayanan resep maupun non-resep serta memberikan KIE kepada pasien.
4. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mempelajari mengenai perencanaan dalam mendirikan apotek.

## **5.2 Saran**

Saran yang dapat diberikan selama melakukan PKPA di Apotek Bagiana adalah:

1. Mahasiswa calon apoteker harus mempersiapkan diri mengenai berbagai macam informasi obat-obatan dan sering berlatih agar dapat mmeberikan konseling, informasi obat, dan edukasi yang baik dan benar kepada pasien, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan swamedikasi kepada pasien.
2. Mahasiswa calon apoteker lebih berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan PKPA agar dapat memperoleh semua informasi dan pengalaman yang berguna untuk kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- American Society of Health System Pharmacists., 2011, AHFS Drug Information Essentials, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland, USA Menteri Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI, 2015, Propranolol Hidroksida, *Pusat Informasi Obat Nasional*, <https://pionas.pom.go.id/monografi/propranolol-hidroklorida>, diakses pada 8 juli 2022
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019, *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta.
- Lacy, C.F., Armstrong, L.L, Goldman, M.P. and Lance, L.L., 2009, Drug Information Handbook A Comprehensive Resource for All Clinicians and Healthcare Professionals, American Pharmacists Association, New York
- Menteri Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.

MIMS. 2021, MIMS; Referensi Obat; Informasi Ringkas Produk Obat, Diakses: 20 Juli 2021.

Medscape, 2022, Medscape; Informasi Ringkas Produk Obat. <https://www.medscape.com/>, diakses 1 Agustus 2022

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Integrasi Binmas Online System (BOS) dengan Online Single Submission (OSS), 2021.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, 2018

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, 2011.

Presiden RI, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta

Presiden RI, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta

Sweetman, S.C., 2009, Martindale Edition The Complete Drug Reference, Pharmaceutical Press, 1 Lambeth High Street, London, UK

Undang-Undang Dasar, 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang sudah Diamandemen serta Penjelasannya, tanpa tahun.